



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 7800-7808

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Identitas Kependudukan *Digital* (IKD) Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo

Imam Sucahyo<sup>1✉</sup>, Badrus Samsih<sup>2</sup>, Nourma Ulva Kumala Devi<sup>3</sup>

Universitas Panca Marga

Email: [nourmaulva@gmail.com](mailto:nourmaulva@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan IKD dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan secara digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur pelaksana dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan IKD telah berjalan cukup optimal dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Namun, ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan literasi *digital* masyarakat, lambatnya pembaruan informasi, dan prosedur birokrasi yang masih kaku. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperluas jangkauan sosialisasi IKD dengan pendekatan komunitas berbasis lokal, meningkatkan pelatihan digital kepada masyarakat rentan teknologi, serta menyederhanakan alur birokrasi internal agar pelayanan lebih cepat dan efisien.

Kata Kunci : *Pelayanan Publik, Identitas Kependudukan Digital, Administrasi Kependudukan, Digitalisasi Layanan, Kota Probolinggo.*

## Abstract

This study aims to describe the implementation of IKD as an effort to improve digital population administration services. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation involving implementing officers and community members as service users. The data analysis techniques applied are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the implementation of IKD has been relatively optimal in terms of communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure. However, some obstacles remain, such as limited digital literacy among the public, slow information updates, and rigid bureaucratic procedures. This study recommends that the Department of Population and Civil Registration expand IKD outreach using community-based approaches, increase digital training for technology-vulnerable citizens, and simplify internal bureaucratic procedures to ensure faster and more efficient service delivery.

Keywords: *Public Service, Digital Population Identity, Population Administration, Service Digitalization, Probolinggo City*

## PENDAHULUAN

Pelayanan sangat erat kaitannya dengan kepuasan masyarakat, tentunya dengan mutu yang baik, khususnya bagi pelanggan. Dalam hal ini adalah masyarakat atau publik, yang dikenal dengan istilah pelayanan publik (*public service*). Pelayanan publik merupakan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui instansi pemerintah yang dapat berbentuk administrasi, barang dan jasa (Nainggolan et al., 2022).

Sayangnya, pelayanan publik sangat legam dengan berbagai hal yang dinilai berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi (Mahsyar, 2020). Perkembangan teknologi khususnya dalam pelayanan publik saat ini memberikan banyak perubahan serta dampak positif melalui kemudahan-kemudahan yang ditawarkan (Salsa Bella & Widodo 2023), yang dikenal dengan layanan publik berbasis digital. Disamping itu pelayanan publik berbasis digital telah menyentuh dibanyak bidang publik dalam membantu masyarakat dalam mengakses informasi (Devi & Hermanto, 2022)

Layanan publik berbasis digital sejatinya diistilahkan dengan *E-government* yang juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Muliawaty & Hendryawan 2020) yang mengedepankan sistem kerja institusi pemerintah dari manual menuju sistem komputerisasi atau berbasis *online* (Rahmaini, 2021) Sistem demikian telah diterapkan oleh segenap instansi pemerintah dari pusat hingga daerah, tidak terkecuali dinas-dinas di Kota Probolinggo.

Salah satu dinas yang menerapkan sistem kerja komputerisasi berbasis *online* di Kota Probolinggo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang telah

menerapkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berbasis *online*. IKD merupakan identitas kependudukan yang dinyatakan dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (E- KTP). Program ini diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas dan keamanan dokumen kependudukan dengan memanfaatkan *platform* digital, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus bergantung pada dokumen fisik.

IKD merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau berbasis digital sebagai inovasi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang dapat digunakan masyarakat yang sudah memiliki KTP Elektronik. Adapun Payung Hukum IKD dimaksud sebagaimana tertera pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Nur et al., 2024) yang salah satu tujuannya untuk mengikuti penggunaan teknologi informasi serta komunikasi terkait digitalisasi, pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Kelebihan IKD adalah sinkronisasi serta sentralisasi data yang terintegrasi tentunya bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal perizinan. Oleh karena itu, penerapan sistem digital pada KTP elektronik diharapkan dapat mendukung reformasi birokrasi. Selain itu, penggunaan IKD juga memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan kenyamanan bagi masyarakat karena dapat diakses hanya melalui smartphone, kapan pun dan dimanapun. Sedangkan kekurangan IKD adalah akses IKD yang memerlukan koneksi internet juga menjadi kendala, terutama bagi penduduk di daerah yang terisolasi dan belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat merasa bahwa penggunaan IKD masih belum tepat diterapkan secara menyeluruh. Selain itu, sering kali aplikasi IKD mengalami gangguan atau tidak dapat diakses ketika membuka dokumen, meskipun penyebabnya tidak selalu jelas. Tidak semua aplikasi mengalami masalah ini, namun kejadian tersebut cukup menghambat pengguna dalam memanfaatkan IKD secara optimal.

Sedangkan tujuan yang lain, diantaranya untuk meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat, mempercepat pertukaran pelayanan publik maupun privat dalam bentuk digital dan memberikan keamanan data melalui proses verifikasi untuk mencegah kesalahan representasi dan kebocoran informasi. (Salsa Bella & Widodo 2023).

Harapannya warga Kota Probolinggo dapat menerima dokumen kependudukan yang tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga secara digital yang dimuat dalam KTP-E, data kependudukan, surat keterangan kependudukan, kartu keluarga, dan surat keterangan sipil,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Istikhomah & Indriasari 2024). Disamping itu juga untuk meminimalisir pemalsuan, mempermudah dan mempercepat berbagai transaksi pelayanan publik, serta meminimalisir biaya pengadaan blanko KTP-E (Istikhomah & Indriasari 2024). Termasuk dapat mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (Zahro & Wahyuni 2024). Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digunakan oleh masyarakat Kota Probolinggo melalui Disdukcapil.

Aplikasi IKD bukan tanpa cela. Setidaknya masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi dan informasi, kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat tidak mengetahui dan atau tidak mengakses aplikasi IKD (Safitri, 2023). Kelemahan lainnya adalah kerentanannya terhadap pencurian data akibat kelemahan sistem, yang menjadi kekhawatiran utama masyarakat. Selain itu, penggunaan IKD membutuhkan akses internet, sehingga kurang efektif bagi penduduk di daerah tanpa jaringan. Aplikasi IKD juga sering mengalami gangguan saat membuka dokumen, meskipun tidak semua pengguna mengalami masalah yang sama (Rena, 2025).

Berdasar beberapa kelemahan di atas, bukan tidak mungkin hal tersebut juga akan menimpa pelaksanaan IKD di Disdukcapil Kota Probolinggo. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digunakan oleh masyarakat Kota Probolinggo melalui Disdukcapil.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gejala mengenai apa yang diperoleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi ini dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan beraneka macam metode alamiah (Safarudin et al., 2023). Peneliti menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan suatu tempat yang telah ditentukan atau diputuskan sehingga dapat digunakan sebagai lokasi untuk menggali dampak objektif.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Probolinggo, yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 19, Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kependudukan, termasuk implementasi identitas kependudukan digital (IKD). Selain itu, penelitian juga melibatkan unit kerja terkait di Disdukcapil yang

berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat untuk mengetahui efektivitas penerapan identitas kependudukan digital.

Fokus penelitian Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital melalui IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo ini penulis dasarkan pada teori implementasi Edward III, yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, menggunakan teknik-teknik dalam penelitian ini sebagai berikut: wawancara, observasi, dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Identitas Kependudukan *Digital* (IKD) Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, peneliti mengacu pada teori implementasi pelayanan publik yang dirumuskan oleh Edward III. Teori ini mencakup empat aspek utama, yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Keempat elemen tersebut akan dianalisis untuk melihat bagaimana masing-masing berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan identitas kependudukan *digital* (IKD) di lingkungan Disdukcapil Kota Probolinggo. Penelitian ini juga memuat hasil wawancara sebagai metode pendekatan kualitatif terhadap pelaksanaan IKD di instansi tersebut. Wawancara dilakukan dengan enam orang informan, yang terdiri atas tiga pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo serta tiga warga yang telah menggunakan layanan tersebut.

Dari hasil wawancara diatas menurut teori Edward III, implementasi IKD di Dispendukcapil Kota Probolinggo menunjukkan dinamika birokrasi yang kompleks. Struktur organisasi yang tertata melalui SOP dan pembagian tugas mendukung efektivitas sosialisasi serta kemudahan akses layanan digital. Namun, rigiditas birokrasi memicu hambatan seperti persetujuan berjenjang, lambatnya pembaruan informasi, dan lemahnya koordinasi antarbidang. Praktik manual juga masih ditemukan di tengah sistem digital yang sudah diterapkan. Menariknya, keterlibatan aktif pimpinan menjadi faktor penggerak utama di level pelaksana. Hal ini selaras dengan pandangan Edward III bahwa birokrasi bisa menjadi instrumen stabilitas, namun sekaligus berpotensi menghambat inovasi akibat sifatnya yang hierarkis dan formal.

Studi ini menggunakan kerangka konseptual implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengevaluasi bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Probolinggo menjalankan program Identitas Kependudukan *Digital* (IKD), terutama dalam konteks peningkatan mutu layanan publik berbasis teknologi. Dengan menerapkan teori ini, peneliti dapat menelaah proses penerjemahan kebijakan IKD menjadi langkah-langkah teknis dan operasional oleh para petugas lapangan, serta menilai sejauh mana struktur organisasi yang ada berperan dalam mendukung atau justru menjadi kendala bagi keberhasilan implementasi, berikut empat cakupan elemen dari teori Edward III:

#### 1. Komunikasi

Pelaksanaan program Identitas Kependudukan *Digital* (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor penentu kesuksesan program, sesuai dengan teori Edward III. Berdasarkan data wawancara, informasi mengenai IKD disampaikan melalui berbagai metode, termasuk laman resmi, *platform* media sosial, aplikasi digital, serta kegiatan tatap muka dan sosialisasi. Tujuannya adalah memastikan masyarakat dapat mengerti manfaat IKD serta cara mengoperasikan aplikasinya secara tepat. Mayoritas responden menyatakan bahwa materi pelatihan baik daring maupun luring sangat membantu dalam memahami prosedur IKD.

Kendati demikian, beberapa hambatan masih ditemui, seperti pemakaian istilah teknis yang kurang familiar dan keterlambatan pembaruan informasi, yang berdampak pada kelancaran layanan. Meskipun strategi komunikasi telah dijalankan melalui beragam saluran, penyajian informasinya perlu dibuat lebih sederhana dan sistematis. Pada dasarnya, meski kualitas komunikasi tergolong memadai, masih diperlukan penyempurnaan agar layanan digital pemerintah dapat diakses secara merata dan berfungsi secara efisien.

#### 2. Sumber Daya

Identitas Kependudukan *Digital* (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sumber daya menjadi faktor penting untuk keberhasilan program, sesuai dengan teori Edward III. Kesiapan sumber daya manusia juga terlihat dari pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas petugas yang terlibat langsung. Selain itu, informasi disebarkan secara luas melalui berbagai media dan pendampingan kepada masyarakat, yang meningkatkan pemahaman tentang IKD. Meskipun ada tantangan dalam literasi *digital*, pelayanan tetap optimal berkat jumlah petugas dan waktu operasional yang memadai. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya yang baik

mendukung pelaksanaan IKD sesuai dengan kerangka Edward III yang menekankan pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan.

### 3. Diposisi

Penerapan Identitas Kependudukan *Digital* (IKD) di Dispendukcapil Kota Probolinggo sangat dipengaruhi oleh sikap dan motivasi aparatur, selaras dengan teori Edward III. Petugas menunjukkan komitmen tinggi lewat sosialisasi aktif, baik daring maupun luring, yang menunjukkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Penggunaan aplikasi *digital* mempercepat layanan, didukung oleh pelatihan rutin yang meningkatkan kompetensi dan koordinasi antar bidang. Ini menegaskan pandangan Edward III tentang pentingnya pemahaman dan kolaborasi untuk implementasi yang optimal.

Meskipun masyarakat umumnya merespons positif terhadap kemudahan layanan dan pendampingan petugas, sebagian kelompok masih butuh pendekatan lebih intensif karena literasi digital yang terbatas. Ini memperkuat teori Edward III bahwa kualitas pelaksana kebijakan termasuk motivasi, kapasitas, dan komunikasi adalah penentu utama efektivitas program. Untuk keberlanjutan, evaluasi berkala dibutuhkan agar kompetensi petugas selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### 4. Struktur Birokrasi

Penerapan Identitas Kependudukan *Digital* (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Probolinggo sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Adanya pembagian tugas yang jelas, SOP terperinci, dan alur kerja sistematis terbukti meningkatkan efektivitas layanan dan sosialisasi IKD. Ini mendukung teori Edward III yang menyebutkan bahwa desain organisasi yang baik sangat penting untuk implementasi kebijakan publik yang berhasil. Namun, karakteristik birokrasi yang kaku juga menjadi kendala. Proses persetujuan berjenjang, verifikasi manual, dan lambatnya aliran informasi menghambat percepatan layanan, memperkuat pandangan Edward III tentang bagaimana hierarki berlebihan dapat menghambat inovasi.

Untungnya, peran kepemimpinan yang aktif berhasil menyeimbangkan kondisi ini. Mereka memastikan ketersediaan infrastruktur, pengembangan SDM, dan pengawasan implementasi. Ini menunjukkan bahwa birokrasi dapat mendorong perubahan jika dikelola secara adaptif. Singkatnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi struktur terorganisir dan kepemimpinan dinamis adalah kunci keberhasilan optimal implementasi IKD, konsisten dengan kerangka teori Edward III.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menggantikan KTP fisik dengan dokumen kependudukan digital yang dapat diakses melalui smartphone. IKD memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dapat dianalisis melalui pendekatan teori implementasi Edward III, yang menitikberatkan pada empat aspek utama sebagai berikut:

Komunikasi memegang peranan krusial dalam proses penerapan IKD, dimana informasi terkait program ini disampaikan lewat berbagai media, baik secara *digital* maupun tatap muka, yang secara umum membantu masyarakat dalam memahami manfaat serta cara menggunakan aplikasi IKD. Namun, kendala muncul akibat sebagian masyarakat mengalami adanya keterlambatan dalam pembaruan informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun komunikasi sudah dijalankan cukup efektif, perlu adanya penyederhanaan dalam penyampaian agar informasi dapat diterima dengan lebih luas dan tepat.

Sumber Daya, dalam pengimplementasian IKD didukung oleh perangkat teknologi, jaringan yang memadai, dan kesiapan tenaga petugas yang telah memperoleh pelatihan teknis. Walaupun masih ada tantangan terkait kemampuan literasi digital masyarakat, jumlah petugas yang cukup dan jam operasional yang fleksibel membantu menjaga mutu pelayanan tetap optimal.

Disposisi, atau pelaksana sikap dan motivasi para aparatur di Dispendukcapil berpengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan IKD. Petugas menunjukkan antusiasme dalam melakukan sosialisasi dan tanggap dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Pelatihan berkala dan koordinasi antar unit berjalan lancar sehingga kualitas layanan *digital* meningkat.

Struktur Birokrasi, yang mana keberhasilan penerapan IKD juga yang terorganisir dengan baik, termasuk adanya pembagian tugas yang jelas dan alur kerja yang sistematis. SOP yang terperinci menjadi pedoman dalam menjalankan layanan. Serta, peran kepemimpinan yang adaptif menjadi kunci dalam menjaga dinamika pelaksanaan program sehingga tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Devi, N. U. K., & Hermanto, H. (2022). OPTIMALISASI PUBLIKASI KARYA ILMIAH MELALUI OBJEK DIGITAL AKTIVASI DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) DI UNIVERSITAS PMG JAWA TIMUR. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian; Vol 6 No 2 (2022): AGUSTUS - DESEMBER*. <https://doi.org/10.36841/integritas.v6i2.2529>
- Istikhomah, I., & Indriasari, S. (2024). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. *Fenomena*, 7267(March).
- Mahsyar, A. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Boruna Horizon*.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu ...*, 11, 101–112.
- Nainggolan, E. S., Utomo, H. S., & Rande, S. (2022). eJournal Administrasi Publik. *Journal Administrasi Publik*, 10(1), 6003–6016.
- Nur, I. A., Abdi, A., & Wahid, N. (2024). Efektivitas Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Digital Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. *Kajian Ilmiah Mahasiswa ...*, 5.
- Rena, M. F. (2025). *EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL ( IKD ) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG Effectiveness of Digital Population Identity ( IKD ) Program Services at the Population and Civil Registration Office of Malang C. April 2024*.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Safitri, D. V. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(2), 59–65.
- Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>
- Zahro, A. A., & Wahyuni, E. S. (2024). TRANSFORMASI E-KTP MENJADI KTP DIGITAL MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 14(2), 63–71.